

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan analisis yang penulis jabarkan di atas, asas-asas di atas secara konsep *welfare state* sudah memenuhi bagaimana penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Contohnya, asas keadilan dan asas kemanfaatan sudah sesuai dengan konsep *welfare state* sebagaimana telah diatur dalam UU 11/2009.
2. Meskipun secara konseptual penerapan asas-asas penyelenggaraan kesejahteraan sosial (terutama asas keadilan sosial dan kemanfaatan) menunjukkan potensi besar untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat di masa krisis seperti pandemi COVID-19, pada praktiknya efektivitasnya masih jauh dari optimal. Misalnya, meski bantuan tunai PKH dan BLT Desa dirancang untuk menahan laju penurunan daya beli dan menghindarkan keluarga penerima dari kemiskinan akut, masih banyak laporan keterlambatan pencairan, kesalahan pendataan, dan tumpang tindih penerima yang menyebabkan bantuan tidak selalu tepat sasaran. Selain itu, dalam hal asas kemanfaatan, di mana bantuan diharapkan mampu menjadi jembatan transformatif menuju kemandirian ekonomi, pendampingan pasca bantuan seringkali terbatas atau tidak konsisten, sehingga banyak penerima yang kembali terpuruk setelah periode bantuan berakhir. Kondisi ini menandakan bahwa meski kerangka filosofis dan regulasi telah memadai, perbaikan mendasar pada aspek manajemen data,

koordinasi antar-instansi, dan dukungan pelatihan berkelanjutan sangat dibutuhkan agar program bansos tidak hanya meredam dampak krisis sesaat, tetapi juga membangun ketahanan ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat. Di sisi lain, pengalaman Pemilu Presiden 2024 menunjukkan bahwa penyaluran bansos mudah dipolitisasi, dengan praktik distribusi yang kerap diarahkan untuk memperkuat basis elektoral tertentu, yang pada akhirnya merusak prinsip keadilan dan transparansi serta mengurangi kepercayaan publik terhadap program itu sendiri. Oleh karena itu, upaya reformasi penyelenggaraan bansos harus mencakup pula mekanisme penjaminan netralitas politik dan penguatan pengawasan agar kebijakan sosial benar-benar memprioritaskan kepentingan rakyat, bukan kepentingan kekuasaan.

B. Saran

1. Untuk menjamin asas keadilan sosial dalam penyaluran bantuan sosial, pemerintah perlu melakukan pemutakhiran dan validasi menyeluruh terhadap Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) secara berkala, dengan melibatkan lembaga independen, akademisi, dan perwakilan komunitas lokal. Mekanisme pelaporan publik yang mudah diakses harus tersedia untuk mencegah manipulasi dan kesalahan pendataan. Program pemberdayaan seperti PKH dan Kartu Prakerja perlu diperkuat melalui kemitraan antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga pelatihan vokasi terpercaya, dengan kurikulum berbasis kebutuhan pasar kerja lokal serta sistem pendampingan berkelanjutan. Digitalisasi penyaluran bantuan

harus disertai penerapan teknologi audit terbuka seperti blockchain untuk memungkinkan pelacakan real-time dari alokasi hingga pencairan dana. Selain itu, peran KPK, BPKP, dan lembaga pengawas daerah harus diperkuat untuk melakukan audit mendadak dan penindakan tegas terhadap penyalahgunaan anggaran.

2. Forum dialog multi-stakeholder perlu dibentuk di setiap tingkatan pemerintahan, yang melibatkan kelompok rentan, organisasi masyarakat sipil, serta tokoh adat dan agama sejak tahap perumusan hingga evaluasi kebijakan, guna memastikan partisipasi bermakna dan responsivitas terhadap dinamika sosial. Untuk menjamin keberlanjutan program, pemerintah harus menyusun kerangka jangka menengah dan panjang yang terintegrasi dengan kebijakan pembangunan daerah, pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan, lengkap dengan indikator kinerja dan evaluasi berkala. Regulasi pelaksanaan bantuan sosial perlu direvisi agar mencakup sanksi administratif dan pidana yang jelas bagi pelanggaran prosedur, serta mewajibkan setiap kementerian/lembaga terkait untuk menyusun laporan publik berkala mengenai capaian, tantangan, dan rencana perbaikan. Dengan demikian, bantuan sosial tidak hanya menjadi respons jangka pendek, tetapi juga instrumen transformasi sosial yang adaptif dan berkelanjutan.